

LAPORAN KINERJA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
**Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2023**

PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 terutama Pasal 1 (11) menguraikan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Pasal 18 dan 20 Perpres di atas juga menguraikan tentang laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja tahunan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. berdasarkan laporan kinerja tahunan itu, pimpinan unit organisasi menyusun laporan kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga. Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan selama tahun anggaran 2023 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Lampiran II, diuraikan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Untuk itu, BPMP Provinsi Sumatera Selatan membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Melalui penetapan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, diharapkan kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat diukur dan dinilai oleh berbagai pihak, termasuk oleh masyarakat.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis, sasaran program, atau sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara umum, BPMP provinsi Sumatera Selatan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang ditunjukkan pada tahun 2023, termasuk juga tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi sekaligus masukan dalam penyusunan rencana untuk peningkatan kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi berbagai pihak dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan serta upaya membangun kualitas pendidikan yang lebih baik di Provinsi Sumatera Selatan maupun kualitas pendidikan Indonesia pada umumnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak selama ini, eksternal maupun internal BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Indralaya, Januari 2024

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan,



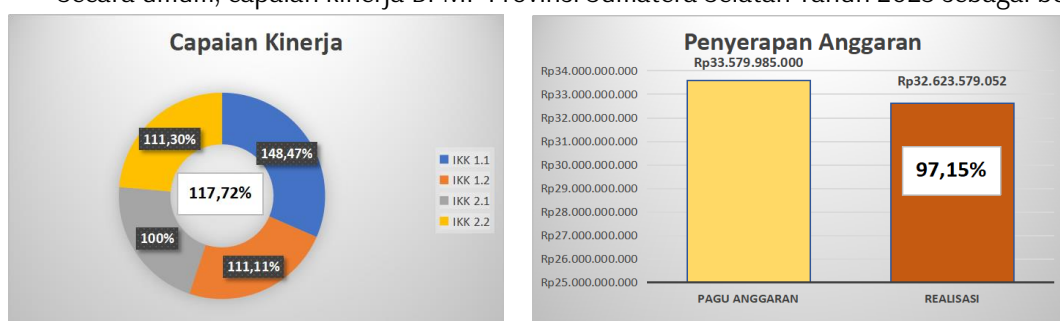
Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
NIP 19751125 200501 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan capaian 2 sasaran kegiatan (SK) dengan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Tingkat ketercapaian SK 1 dan 2 dan IKK 1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2 secara komprehensif diuraikan pada tabel berikut.

Output	Target, Realisasi, Capaian Kinerja	Tahun		
		2022	2023	2024
1. Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan				
IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Target	0.98	1.96	3.92
	Realisasi	3.93	2.91	
	Capaian Kinerja	401.02%	148.47%	
IKK 1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Target	25	30	35
	Realisasi	100	33.33	
	Capaian Kinerja	400%	111.11%	
2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel				
IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Target	A	A	A
	Realisasi	A	A	
	Capaian Kinerja	100%	100%	
IKK2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Target	83	84	94
	Realisasi	97.54	93.49	
	Capaian Kinerja	117.52%	111.30%	

Secara umum, capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagai berikut.



Kendala dan permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian target kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. Terdapat miskonsepsi terhadap ragam Kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi peran penting dalam transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

2. Keterbatasan pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terhadap ragam platform pendidikan berbasis teknologi yang mendukung transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
3. Pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terhadap ukuran capaian sistem pendidikan yang mempengaruhi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan.
4. Kerjasama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam upaya transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu lebih dioptimalkan
5. Keterbatasan pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terkait konsekuensi yang diterimanya untuk mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya pemulihan pembelajaran dan transformasi pendidikan
6. Komitmen pemangku kepentingan pada ekosistem pendidikan dalam bersinergi, berkolaborasi, dan berbagi peran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan
7. Keterbatasan infrastruktur pendukung dalam transformasi digital yang mendukung implementasi ragam Kebijakan Merdeka Belajar.

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program prioritas Kemendikbudristek
2. Memprioritaskan penugasan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan sasaran capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung program prioritas Kemendikbudristek
3. Meningkatkan intensitas kerja sama dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan pendidikan di daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi BPMP dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam penyelarasan pelaksanaan program prioritas
5. Mengembangkan strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan untuk transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan
6. Melaksanakan advokasi yang lebih fokus dan asimetris kepada pemerintah daerah untuk transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan
7. Optimalisasi, kolaborasi, dan pendampingan melekat terkait implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
8. Lebih mengintensifkan rapat berkala dalam upaya mencapai kinerja, mitigasi risiko, dan manajemen isu
9. Mengaktivasi pertemuan PMO yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan secara berkala dalam penyelarasan pelaksanaan program
10. Penguatan peran dan *product knowledge* pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memahami Kebijakan Merdeka Belajar
11. Peningkatan kompetensi melalui berbagai bentuk kegiatan seperti In House Training (IHT) maupun belajar melalui komunitas belajar (kombel) di internal BPMP maupun kombel antar-UPT Kemendikbudristek.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum	5
C. Tugas dan Fungsi	6
D. Isu Strategis	7
E. Peran Strategis.....	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 10
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	11
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	11
C. Rencana Kinerja Jangka Menengah	9
D. Perjanjian Kinerja	13
E. Program Prioritas	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 21
A. Capaian Kinerja	21
B. Capaian Anggaran	35
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program <i>Crosscutting/Collaborative</i>	43
 BAB IV PENUTUP	 50
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan	4
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Selatan	11
Tabel 2.2	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan	11
Tabel 2.3	Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Awal BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	13
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Akhir BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	14
Tabel 3.1	Data Akreditasi Satuan PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2023.....	23
Tabel 3.2	Hasil Perhitungan IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.....	24
Tabel 3.3	Perhitungan Nilai IKK 1.2 Berdasarkan Keniakan Mutu Pembelajaran Prov/Kab/Kota Tahun 2021 dan 2022	29
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan	3
Gambar 1.2	Struktur Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan	3
Gambar 3.1	Target Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	22
Gambar 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Capaian IKK 1.1 Tahun 2023	23
Gambar 3.3	Perbandingan Capaian IKK 1.1 Tahun 2022, 2023, dan Renstra 2024	24
Gambar 3.4	Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.2 Tahun 2023	28
Gambar 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja IKK 1.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, 2023 dan Target Akhir Renstra 2024	29
Gambar 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 , 2023 dan Target Akhir Renstra 2024	36
Gambar 3.7	Tingkat Implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023	37
Gambar 3.8	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	39
Gambar 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 , 2023 dan Target Akhir Renstra 2024	40

BAB I | PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan merupakan satuan kerja/unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pada awal berdirinya, BPMP Provinsi Sumatera Selatan dikenal dengan nama Balai Penataran Guru (BPG) Palembang. BPG Palembang mulai beroperasi pada tanggal 21 Januari 1984 dan diresmikan pada tanggal 3 Februari 1987 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Republik Indonesia, Bambang Triantoro. Dalam perkembangannya, BPG Palembang mengalami beberapa perubahan baik terkait nomenklatur maupun tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan. Perubahan nomenklatur pertama, BPG Palembang berubah menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Selanjutnya berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2012 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, nomenklatur Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Dinamika regulasi terakhir yaitu berdasar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan berubah nomenklatur menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Khusus BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek, jangkauan wilayah kerja dan perannya mencakup Provinsi Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Selanjutnya terkait kepemimpinan, dari awal berdiri sebagai Balai Penataran Guru (BPG) Palembang hingga saat ini, BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah dipimpin oleh 8 orang kepala sebagai berikut:

- a. Drs. H.M. Arif Husin
(Kepala BPG Palembang periode 1983 - 1990)
- b. Drs. H. Syafei Alim, M.A.
(Kepala BPG Palembang periode tahun 1990 - 1995)
- c. Drs. H. Ade Karyana, M.Ed.
(Kepala BPG Palembang periode tahun 1995 - 2000)
- d. Drs. H. Rusman Effendi, M.Pd.
(Kepala BPG Palembang periode tahun 2000 - 2003 dan Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2003 - 2009)
- e. Drs. Iskandar Saleh, M.Pd.
(Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009 - 2013)
- f. Drs. H. Yaswardi, M.Si.
(Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2013 - 2019)
- g. Drs. Suyato, M.AP.
Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2019 - 2022
- h. Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan periode Oktober 2022 - sekarang

A.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 11 Tahun 2022, struktur organisasi BPMP terdiri atas 1 orang administrator yaitu kepala dan 1 orang pengawas yaitu Kepala Subbagian Umum serta kelompok jabatan fungsional. Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan tercantum pada Gambar 1.1 berikut.

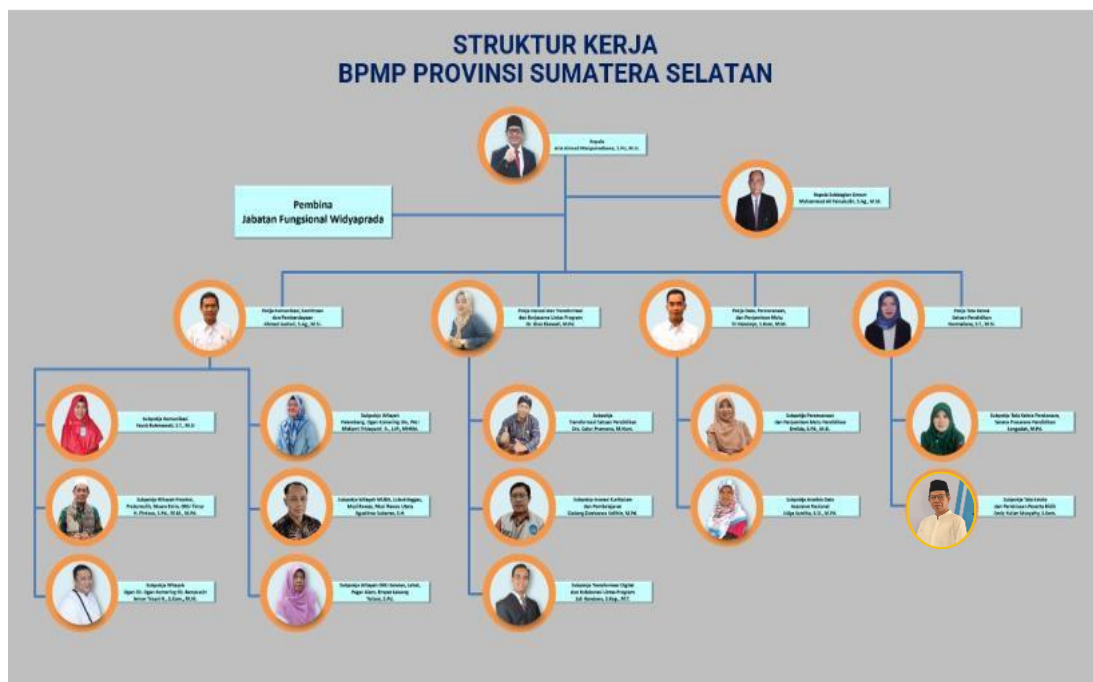
STRUKTUR ORGANISASI BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas BPMP Provinsi Sumatera Selatan yaitu melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, dan untuk optimalisasi capaian kinerja organisasi serta penyelarasan dengan unit kerja pusat, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan transformasi struktur kerja dengan pembentukan kelompok kerja. Struktur kerja tersebut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Struktur Kerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan

A.2. Profil SDM

Secara keseluruhan jumlah pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan per Desember 2023 yaitu sebanyak 111 orang. Komposisi pegawai ini terdiri atas 76 orang PNS dan 35 orang PPNP/NonPNS, seperti tersaji pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Keadaan	Jumlah	Keterangan
Status Kepegawaian:		
PNS	76 orang	
NonPNS	35 orang	
PNS berdasarkan Status Jabatan:		
Pimpinan Eselon III	1 orang	
Pimpinan Eselon IV	1 orang	
Jabatan Pelaksana	58 orang	
Jabatan Fungsional	16 orang	13 Widyaprada 2 perawat 1 pustakawan
PNS berdasarkan Status Pendidikan:		
Doktor/S3	2 orang	
Magister/S2	34 orang	
Sarjana/S1	25 orang	
Sarjana Muda/Diploma	2 orang	
SMA	10 orang	
SMP	3 orang	
Jumlah	76 orang	
PNS berdasarkan Status Kepangkatan:		
Golongan IV	29 orang	
Golongan III	37 orang	
Golongan II	7 orang	
Golongan I	3 orang	
Jumlah	76 orang	
PNS berdasarkan Jenis Kelamin:		
Laki-laki	51 orang	
Perempuan	25 orang	
Jumlah	76 orang	

Sumber: Data Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Desember 2023

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 262 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
19. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1325/2022, Nomor 835 Tahun 2022 dan Nomor 119-5091.A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik
20. Program Kerja dan DIPA BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Tugas dan Fungsi

C.1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi.

C.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022, BPMP menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat

2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

Selanjutnya untuk mendukung transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam melaksanakan ragam kebijakan Merdeka Belajar, pada tahun 2022 hingga 2023 mekanisme struktur kerja BPMP berubah menjadi beberapa kelompok kerja, yaitu:

- a. Kelompok Kerja 1 (Pokja 01): Pokja Komunikasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Komunitas
- b. Kelompok Kerja 2 (Pokja 02): Pokja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran
- c. Kelompok Kerja 3 (Pokja 03): Pokja Data, Perencanaan dan Penjaminan Mutu
- d. Kelompok Kerja 4 (Pokja 04): Pokja Tata Kelola Satuan Pendidikan

Pada masing-masing pokja ditetapkan 1 ketua pokja dan beberapa ketua subpokja (Kasubja) serta anggota pokja.

D. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menghadapi berbagai tantangan atau isu strategis. Tantangan dan isu strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan, antara lain sebagai berikut.

a. Isu Strategis Eksternal

Beberapa isu strategis yang berasal dari eksternal BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA belum terpenuhi secara optimal.
2. Kualitas pendidikan antar satuan pendidikan dan antar wilayah masih memiliki disparitas yang cukup tinggi.
3. Pemerataan akses pendidikan yang belum merata terutama untuk daerah/wilayah dengan kondisi geografis berupa perairan atau pegunungan.
4. Strategi dan pendekatan asimetris dan konsultatif belum efektif dan optimal terhadap hasil data capaian rapor pendidikan masing-masing pemerintah daerah dan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar.
5. Rotasi/mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah menjadi kendala/hambatan dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait keberlanjutan dan keterlaksanaan program-program prioritas Kemendikbudristek.
6. Strategi advokasi dan pendampingan asimetris Kebijakan Merdeka Belajar kepada pemerintah daerah dan pelaku ekosistem pendidikan lainnya belum memberikan hasil optimal.
7. Dukungan keberlanjutan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar oleh pemerintah daerah setelah penerbitan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
8. Penguatan koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan daerah dan Tim Subja Wilayah terkait Kebijakan Merdeka Belajar dan program prioritas Kemendikbudristek belum optimal.
9. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan belum tuntas dan membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
10. Masih banyak Guru Penggerak yang belum diangkat/ditugasi oleh Pemerintah Daerah sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah.

b. Isu Strategis Internal

Beberapa isu strategis yang berasal dari internal BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Menciptakan budaya belajar sepanjang hayat bagi seluruh pegawai secara mandiri dalam rangka optimalisasi transformasi UPT

2. Pengembangan kapasitas SDM dilakukan secara proaktif, dinamis, dan mandiri serta mengarah pada *asset based thinking* bukan *deficit based thinking*
3. Optimalisasi sinergitas seluruh tim kerja UPT dalam mendukung semua tugas dan fungsi serta program UPT
4. Optimalisasi pemanfaatan ragam media komunikasi dan publikasi lembaga untuk memaksimalkan informasi hasil capaian kinerja satuan kerja pada semua pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan
5. Dukungan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan komunikasi dan publikasi ragam informasi Kebijakan Merdeka Belajar dan program prioritas Kemdikbudristek lainnya
6. Layanan publik satuan kerja dilakukan melalui optimalisasi peran Unit Layanan Terpadu (ULT) dan Pusat Bantuan (*Helpdesk*) program prioritas Kemendikbudristek.
7. Transisi penyelarasan program kerja UPT dengan target objektif PDM di unit utama.

E. Peran Strategis

BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam:

1. Mengawal keterlaksanaan dan keberlanjutan program Kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan
2. Menyelaraskan regulasi pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan dalam bentuk advokasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi
3. Melakukan sinkronisasi program peningkatan mutu pendidikan pada pemerintah daerah dengan program prioritas Kemendikbudristek
4. Mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi antara BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya
5. Meningkatkan kompetensi dan partisipasi aktif ASN BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian kinerja organisasi.

Visi dan misi BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global yang mendukung visi dan misi Presiden.

Seperti diketahui, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan aspek penting dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar bagi berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025), Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025 (RPJMN 2020-2025), dan Visi Indonesia 2045 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah "... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ..."
- b. RPJPN 2005-2025 memiliki visi "... terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI"
- c. Dua dari sembilan misi Presiden yaitu "Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa"
- d. Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2025 adalah "masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing" serta salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045, yaitu "Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi".

Untuk mengawal pencapaian visi dan misi di atas, BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan motto yakni “Tetap Melayani dengan HATI.” HATI merupakan akronim dari nilai-nilai yang diharapkan menjadi budaya kerja dan pelayanan pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan yaitu Humanis, Amanah, Tanpa pamrih, dan ber-Integritas.

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Perumusan tujuan dan indikator kinerja tujuan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

TUJUAN	▪ Peningkatan mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan ▪ Peningkatan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA TUJUAN	▪ Meningkatnya mutu pembelajaran satuan pendidikan (PAUD Dikmas) di Provinsi Sumatera Selatan ▪ Meningkatnya rapor pendidikan (Dikdas dan Dikmen) Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Selatan ▪ Tercapainya SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan predikat memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel ▪ Tercapainya nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan RKAKL minimal 85

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

SASARAN KEGIATAN	▪ Meningkatnya mutu pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan
-------------------------	--

	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	- Meningkatnya persentase mutu pembelajaran pada satuan pendidikan (PAUD Dikmas) - Meningkatnya persentase rapor pendidikan (Dikdas dan Dikmen) Prov/Kab/Kota - Meningkatnya predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan - Meningkatnya nilai kinerja anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan



Rencana Kinerja Jangka Menengah

Rencana Kinerja Jangka Menengah BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 menetapkan target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Baseline	Target Kinerja		
		2020	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan				
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	-	0,98	1,96	3,92
IKK 1.2	Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	-	25,00	30,00	35,00
SK	Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel				
IKK 2. 1	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	BB	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	81	83	84	85

Tujuan strategis sasaran kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Selatan periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan
2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel.

Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, BPMP Provinsi Sumatera Selatan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam perjanjian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Awal BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
	[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	84

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp20.643.003.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp15.103.279.000

Revisi perjanjian kinerja terjadi karena revisi relaksasi blokir AA dan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dan penyesuaian tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang diundangkan tanggal 29 Maret 2022.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Akhir BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
	[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	84

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp17.448.574.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp16.131.411.000



Program Prioritas

BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi memiliki tugas dan fungsi dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Terwujudnya mutu dan kualitas pendidikan tercermin melalui

perjanjian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan yaitu meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dan meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Adapun indikator kinerja kegiatan yaitu sebagai berikut: persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya, persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen), Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memenuhi Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPMP Provinsi Sumatera Selatan maka dilaksanakan program-program prioritas sebagai berikut:

1. Satuan PAUD, Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya

a. Pembinaan Program Sekolah Penggerak (PSP)

Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 80% PSP 1, peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 60% PSP 2, peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 40% PSP 3, minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, 35% pemda siap melanjutkan Implementasi PSP angkatan 1 (regulasi dan anggaran).

b. Pembinaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)

IKM merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) yang diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran. Merujuk pada kondisi dimana pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: peningkatan pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana IKM menjadi 90%, peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar peserta didik menjadi 50%, dan peningkatan hasil AN tahun 2024 untuk sekolah IKM, minimal 50% untuk seluruh satuan pendidikan IKM yang berdasarkan hasil AN 2023 ada pada level 1 dan 2 untuk capaian literasi, numerasi, karakter, dan indeks pembelajaran.

c. Sumber Daya Sekolah (SDS)

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOSP Tahun 2023 lampiran II bahwa hasil penyusunan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) diinput/dituangkan ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh Kementerian, yang disebut aplikasi platform Sumber Daya Sekolah (SDS) yang merupakan platform terintegrasi antara ARKAS, Dapodik, Markas, dan SIPD. Aplikasi ini juga digunakan dalam pelaksanaan penatausahaan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 100% satuan pendidikan penerima BOS menggunakan ARKAS 4.0, 50% satuan pendidikan penerima BOP menggunakan ARKAS 4.0, 60% satuan pendidikan menggunakan SIPLah, 100% satuan pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu, dan 50% satuan pendidikan melakukan perencanaan pada T-1.

d. Optimalisasi *Chromebook* Dan Belajar.id

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan program yang berdampak pada peserta didik melalui beragam program prioritas yang memerlukan dukungan semua ekosistem. Dalam rangka mendukung hal tersebut Kemendikbudristek kemudian menindaklanjuti dengan pengadaan serta pemanfaatan *Chromebook* dan belajar.id untuk membantu pemanfaatan platform digital di satuan pendidikan dalam mendukung proses transformasi pembelajaran. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 100% penerima bantuan *Chromebook* memanfaatkan untuk pembelajaran, 100% akun belajar.id aktif, dan 50% satuan pendidikan memanfaatkan *Google Workspace for Education*.

e. Optimalisasi Pemanfaatan Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan merupakan kebijakan Kemendikbudristek berdasarkan Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Rapor pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Platform ini ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data. Satuan pendidikan dapat melihat secara detail elemen-elemen per dimensi,

sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di tempat masing-masing. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 100% Pemda mengakses rapor pendidikan, 100% satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah mengakses rapor pendidikan, dan 50% satuan pendidikan jenjang PAUD mengakses rapor pendidikan.

f. Pembinaan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan pencapaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data digunakan sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui perencanaan dengan berbasis pada akar masalah yang ada. Satuan pendidikan dapat memanfaatkan rapor pendidikan melalui perencanaan berbasis data untuk melakukan identifikasi masalah, refleksi, dan terus melakukan pembenahan layanan pendidikan agar perubahan pada kualitas pendidikan dapat dirasakan, mulai dari pembelajaran di kelas dan pengelolaan satuan pendidikan. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 80% satuan pendidikan dasar dan menengah melaksanakan PBD melalui unduh lembar PBD, 45% PAUD melaksanakan perencanaan berbasis data melalui unduh lembar PBD dan 30% satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki delta positif pada capaian indikator prioritas rapor pendidikan.

g. Pembinaan Perencanaan Berbasis Data (PBD) Daerah

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan, maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan pencapaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 50% Pemda memasukkan indikator kinerja SPM Pendidikan, 50% Pemda memenuhi sub-kegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan dan 30% Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) memiliki delta positif indeks SPM Pendidikan.

h. Kemitraan Daerah

Dalam kerangka transformasi yang diluncurkan Ditjen PAUD Dikdasmen dimana salah satu strateginya adalah transformasi satuan pendidikan melalui kemitraan daerah dan pemberdayaan komunitas yang memiliki peran: (1) Mewujudkan jalinan hubungan yang baik

dan berkelanjutan dengan semua Pemda dan komunitas, 2) Mengoordinasikan semua UPT melalui komunikasi dan advokasi dengan pemda dan pemangku kepentingan lainnya, dan 3) Menyinerjikan semua potensi daerah dan komunitas dalam melaksanakan transformasi satuan pendidikan. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: persepsi Pemda terhadap dampak positif Kebijakan Merdeka Belajar meningkat minimal positif 90% melalui advokasi UPT, pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah meningkat sebesar 80-100% melalui advokasi UPT kepada Pemda dan peningkatan capaian delta AN sebesar 30% melalui advokasi UPT kepada Pemda (peningkatan skor AN untuk 30% satuan pendidikan di Indonesia).

i. Asesmen Nasional

Asesmen Nasional (AN) adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM Literasi, Numerasi), Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar (sulingjar). Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: meningkatkan persepsi positif stakeholder daerah dan satuan pendidikan terhadap urgensi Kebijakan pelaksanaan UN dan SulingJar sebesar 30% dan meningkatkan delta rata-rata 2% partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023.

j. Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD/MI/ sederajat dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 75% Kabupaten/Kota melaksanakan advokasi serta aksi konkret untuk penguatan transisi PAUD-SD, 10% satuan pendidikan (PAUD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru dan 10% satuan pendidikan (SD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru.

k. Pemulihan Pembelajaran

Pemulihan dan transformasi pembelajaran merupakan upaya menanggulangi krisis pembelajaran di Indonesia melalui berbagai ragam kegiatan antara lain ToT yang dilanjutkan Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui Peningkatan Literasi Daerah, Pendampingan Kombel, dan Refleksi Intervensi UPT terkait penguatan literasi yang diinisiasi Kemendikbudristek. Adapun indikator dan target

yang ingin dicapai dari program tersebut adalah: 20% SD level 1 meningkat capaian literasinya (A1) di tahun 2023 dan 20% SD level 2 meningkat capaian literasinya (A1) di tahun 2023.

I. Gerakan Sekolah Sehat

Dalam upaya meningkatkan kesehatan peserta didik, Kemendikbudristek telah menetapkan Kebijakan Kampanye Sekolah Sehat (KSS). Kampanye ini bertujuan memberi ruang kepada berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik secara berkelanjutan dan fokus pada 3 sehat. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah 75% Pemerintah Daerah mengeluarkan surat edaran tentang Kebijakan Implementasi Sekolah Sehat, 16 satuan pendidikan meningkat kategori status kesehatannya dari merah menjadi kuning pada tahun 2024, dan 75% dari satuan pendidikan binaan (40 satuan pendidikan) mengimplementasikan program gerakan sekolah sehat dan terpetakan kebugaran peserta didiknya.

m. Pendidikan Khusus

Pendidikan inklusi adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya agar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya. Adapun indikator dan target yang ingin dicapai dari program tersebut adalah peningkatan skor sebesar 0,2 untuk 30% satuan pendidikan umum dan kejuruan yang memiliki iklim inklusivitas merintis.

2. Layanan Dukungan Manajemen Internal

a. Reformasi Birokrasi Internal (RBI)

Dalam upaya mendukung reformasi birokrasi internal, BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyederhanaan struktur dan memperkaya fungsi-fungsi yang terkait agar tata kelola organisasi menjadi fleksibel dan efisien. BPMP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Mendikbudristek Nomor 29/0/2022 telah berhasil dan ditetapkan menjadi salah satu satuan kerja dengan status Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Selanjutnya, dengan status tersebut BPMP Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi secara aktif dalam mendampingi satuan kerja lain yang masih berproses meraih predikat ZI WBK. Sehubungan hal ini, pada tanggal 29 Oktober s.d. 1 November 2023, tim BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pendampingan Reformasi Birokrasi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) pada BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas partisipasi ini, BPMP Provinsi

Sumatera Selatan menerima penghargaan dari Sekretariat Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas adalah sistem yang dirancang untuk membantu penerima amanah mempertanggungjawabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diamanahkan, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dengan tujuan terjadi perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan untuk menerapkan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan data kinerja (*IT-based*).

Sehubungan dengan hal tersebut BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 menetapkan target A berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. BPMP Provinsi Sumatera Selatan selalu akan melakukan peningkatan perbaikan pertanggungjawaban efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengawasan dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, bersama ini beberapa hal yang akan dilakukan:

1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital sebagai platform kolaborasi di internal BPMP melalui aplikasi SPASIKITA Kemendikbudristek
2. Melaksanakan reuview renstra minimal satu kali dalam setahun
3. Menjadwalkan rapat rutin secara berkala terkait pengukuran kinerja terhadap capaian Indikator kinerja kegiatan
4. Sosialisasi Perjanjian Kinerja pada seluruh karyawan melalui apel dan rapat rutin senin;
5. Workshop penyusunan Laporan Kinerja tahun berjalan
6. Reuview laporan kinerja oleh tim evaluasi
7. Melaksanakan akuntabilitas mandiri satker melalui aplikasi SPASIKITA
8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil Lembar Hasil Evaluasi (LHE) dan di-input pada aplikasi SPASIKITA.

Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai sasaran (kinerja) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan dilakukan dalam upaya memberikan kontribusi memenuhi visi Presiden Republik Indonesia dalam penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu “Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.



A. Capaian Kinerja

BPMP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan dua sasaran kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen;
2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran Kegiatan 1



Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, khususnya pasal 1 ayat 1, bahwa “Evaluasi Sistem Pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan”.

Bentuk penjaminan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 tertuang dalam target kinerja sasaran kegiatan berikut.



Gambar 3.1 Target Kinerja Sasaran Kegiatan 1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

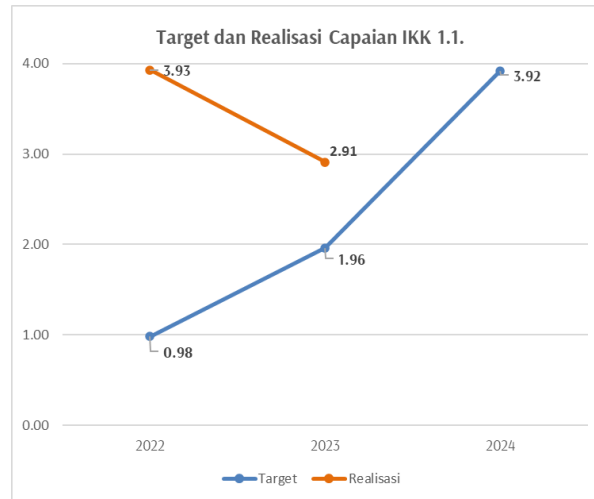
Hasil (*output*) penjaminan mutu pendidikan di atas bermuara pada peningkatan mutu pembelajaran satuan pendidikan PAUD dan Dikmas, serta peningkatan nilai rapor pendidikan provinsi/kabupaten/kota pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.



IKK 1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Target, Realisasi dan Capaian

Target kinerja “Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya” pada Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 1,96 atau sebanyak 108 satuan pendidikan. Perhitungan persentase satuan PAUD dan Dikmas di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 berdasarkan hasil akreditasi tahun 2023 diperoleh realisasi sebesar 2,91 atau sebanyak 160 satuan pendidikan yang meningkat mutu pembelajarannya, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 148,47%. Capaian ini melampaui target renstra dan perjanjian kinerja tahun 2023, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.1 Tahun 2023

Nilai realisasi capaian IKK 1.1 sebesar 2,91 diperoleh berdasarkan data akreditasi tahun 2022-2023/ Data ini bersumber dari BAN PAUD, PSKP, BSKAP, dan Pusdatin yang dilakukan perhitungan dengan rumus berikut.

$$IKK\ 1.1\ (\Delta) = \frac{(0,5 \times A_{23}) + (0,35 \times B_{23}) + (0,15 \times C_{23})}{total\ sekolah\ TA\ 2023} - \frac{(0,5 \times A_{22}) + (0,35 \times B_{22}) + (0,15 \times C_{22})}{total\ sekolah\ TA\ 2022}$$

Keterangan:

1. Δ : Persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2022 ke TA 2023 yang dilihat dari nilai akreditasi
2. A_{23} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2023
3. B_{23} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2023
4. C_{23} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2023
5. A_{22} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2022
6. B_{22} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2022
7. C_{22} : Jumlah sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2022

Data hasil akreditasi Satuan PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

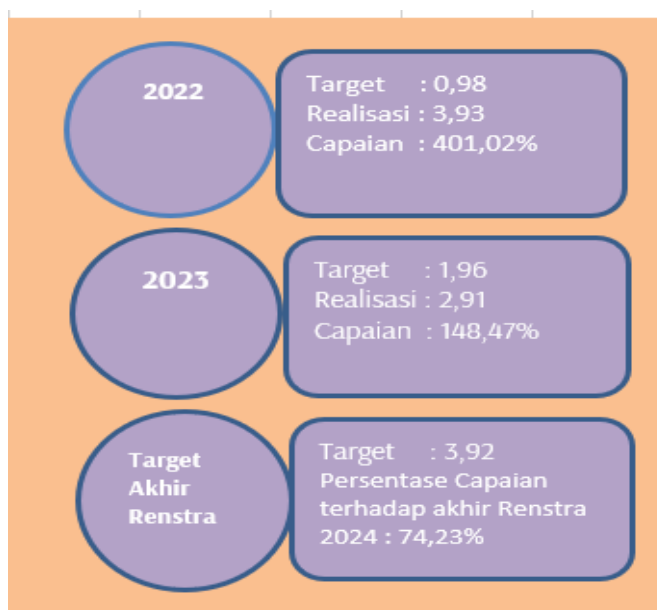
Tabel 3.1 Data Akreditasi Satuan PAUD Dikmas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 -2023

Provinsi Sumatera Selatan	Data Akreditasi								Minimal B bobot
	A	B	Belum Terakreditasi	C	Terakreditasi	Tidak diisi	Tidak Terakreditasi	Jumlah Sekolah	
Tahun 2023	74	1790	173	1324	8	2141	7	5517	15.68
Tahun 2022	71	1508	305	968	11	2703	8	5574	12.77

Dengan memasukkan data akreditasi tersebut ke rumus perhitungan IKK 1.1 diperoleh nilai minimal B bobot tahun 2022-2023 dan nilai IKK 1.1 berikut.

Tabel 3.2 Hasil Perhitungan IKK 1.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Provinsi Sumatera Selatan	Minimal B bobot
Tahun 2023	15.68
Tahun 2022	12.77
IKK 1.1 (Δ)	2.91



Gambar 3.3 Perbandingan Capaian IKK 1.1 Tahun 2022, 2023, dan Renstra 2024

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan, melalui advokasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK 1.1. di mana setiap program dan kegiatan tersebut diidentifikasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya melalui indikator objektif sebagai berikut.

1. Melaksanakan Pembinaan Kurikulum Merdeka

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-02 (Implementasi Kurikulum Merdeka)		
1	Peningkatan pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana IKM menjadi 90%	90%	77,50%
2	Peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah	50%	86,17%

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	berdasarkan permasalahan belajar peserta didik menjadi 50%		
	PDM-09 (Transisi PAUD-SD)		
1	75% Kabupaten/Kota melaksanakan advokasi serta aksi konkret untuk penguatan transisi PAUD-SD	Belum Tersedia	100%
2	10% satuan pendidikan (PAUD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru	10%	40,16%

2. Melaksanakan Pembinaan Asesmen Nasional

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-06 (Asesmen Nasional)		
1	Meningkatkan persepsi positif <i>Stakeholder</i> Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar sebesar 30%	30%	82,55%
2	Meningkatkan delta rata-rata 2% partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023	98,55%	97,49%

3. Melaksanakan Pembinaan Transfer Daerah

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-03 A (Sumber Daya Sekolah)		
1	100% satuan pendidikan penerima BOS menggunakan ARKAS 4.0	100%	99,00%
2	50% satuan pendidikan penerima BOP menggunakan ARKAS 4.0	50%	63,00%
3	60% satuan pendidikan menggunakan SIPLah	71,16%	63%
4	100% satuan pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu	100%	99,5%
5	50% satuan pendidikan melakukan perencanaan pada T-1	95,12%	105%

4. Melaksanakan Pembinaan Sekolah Penggerak

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-01 (Program Sekolah Penggerak)		
4	Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, dengan target 80% PSP 1	81%	100%
5	Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, dengan target 50% PSP 2	53%	95%
6	35% Pemda siap melanjutkan Implementasi PSP Angkatan 1 (regulasi dan anggaran)	2 Pemda	3 Pemda

5. Melaksanakan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-04 A (Rapor Pendidikan)		
1	100% Pemda mengakses Rapor Pendidikan	100%	100%
3	50% Satpen jenjang PAUD mengakses Rapor Pendidikan	66,06%	75,54%
	PDM-04 B (PBD Satuan Pendidikan)		
2	45% PAUD melaksanakan perencanaan berbasis data melalui unduh lembar PBD	63,24%	74,58%
	PDM-04 C (PBD Daerah)		
1	50% Pemda memasukkan indikator kinerja SPM Pendidikan	56%	100%
2	50% Pemda memenuhi subkegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan	56%	100%
3	30% Pemda (Provinsi dan Kab/Kota) memiliki delta positif indeks SPM Pendidikan.	30%	33,33%

6. Melaksanakan Pembinaan Kemitraan

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-05 (Kemitraan Daerah)		
1	Persepsi Pemda terhadap Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar meningkat minimal positif 90% melalui advokasi UPT	90%	100%
2	Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah meningkat sebesar 80 - 100% melalui advokasi UPT kepada Pemda	100%	13%
1	75% Kabupaten/Kota melaksanakan advokasi serta aksi konkret untuk penguatan transisi PAUD-SD	Belum Tersedia	100%
2	10% satuan pendidikan (PAUD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru	10%	40,16%
	PDM-11 (Gerakan Sekolah Sehat)		
1	75% Pemerintah Daerah mengeluarkan SE tentang Kebijakan Implementasi Sekolah Sehat	75%	100%
2	40 Satuan Pendidikan meningkat kategori status kesehatannya dari merah menjadi kuning di tahun 2024	40%	90%
3	75% dari satuan pendidikan binaan (40 satuan pendidikan) mengimplementasikan program gerakan sekolah sehat dan terpetakan kebugaran peserta didiknya	75%	108%

7. Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Inklusi

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-12 (Transformasi Pendidikan Khusus)		
1	Peningkatan skor sebesar 0,2 untuk 30% satuan pendidikan umum dan kejuruan yang memiliki iklim inklusivitas merintis	30%	56,63%

8. Melaksanakan Pembinaan Digitalisasi Sekolah.

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-03 B (Optimalisasi Chromebook dan belajar.id)		
1	100% penerima bantuan Chromebook memanfaatkan untuk pembelajaran	100%	97,57%
2	100% akun belajar.id aktif	100%	66,54%
3	50% satuan pendidikan memanfaatkan Google Workspace for Education	50%	83,60%

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Pendampingan pelaksanaan program Akreditasi *Compulsory* (Sampling Acak) bersama Direktorat PAUD dan BAN PAUD
2. Pendampingan melekat pelaksanaan Program Kesiapan Bersekolah Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan kepada pemerintah daerah
3. Pendampingan melekat terhadap implementasi survei lingkungan belajar di sekolah jenjang PAUD bersama Direktorat PAUD
4. Adanya fasilitasi program prioritas Kemendikbudristek lintas unit utama/satuan kerja.

Target, Realisasi dan Capaian



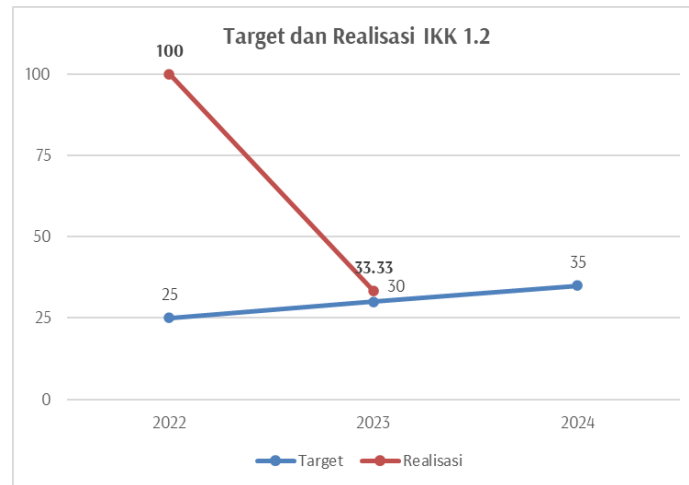
IKK 1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Target kinerja “Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)” BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 30% atau sebanyak 5 daerah (prov/kab/kota) meningkat rapor pendidikannya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, terdapat 6 daerah (prov/kab/kota) telah meningkat rapor pendidikannya dibandingkan tahun sebelumnya sehingga diperoleh realisasi sebesar 33,33%

Laporan Kinerja

BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

dengan capaian kinerja sebesar 111,11% yang berarti melampaui target renstra dan perjanjian kinerja tahun 2023. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4 Target dan Realisasi Kinerja IKK 1.2 Tahun 2023

Untuk menghitung capaian kinerja IKK 1.2. menggunakan rumus perhitungan berikut.

$$IKK\ 1.2 = \sum_{i=1}^n flag(\Delta_i)$$

Keterangan :

1. i : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP Provinsi Sumatera Selatan (1 provinsi dan 17 kab/kota)
2. $flag(\Delta_i)$: Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran

IKK 1.2 dihitung berdasarkan jumlah prov/kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran melalui perhitungan indeks SPM rapor pendidikan prov/kab/kota pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3 Perhitungan Nilai IKK 1.2 Berdasarkan Kenaikan Mutu Pembelajaran
Prov/Kab/Kota Tahun 2021 dan 2022**

Nama Kabupaten/Kota	Indeks SPM				Flag
	2021	2022	Label	Delta	
KAB. OGAN KOMERING ULU	53.96	52.46	BELUM TUNTAS	-1.50	0
KAB. OGAN KOMERING ILIR	52.7	52.00	BELUM TUNTAS	-0.70	0
KAB. MUARA ENIM	54.67	55.24	BELUM TUNTAS	0.57	1
KAB. LAHAT	53.14	51.86	BELUM TUNTAS	-1.28	0
KAB. MUSI RAWAS	55.01	50.75	BELUM TUNTAS	-4.26	0
KAB. MUSI BANYUASIN	55.2	51.40	BELUM TUNTAS	-3.80	0
KAB. BANYUASIN	53.96	52.35	BELUM TUNTAS	-1.61	0
KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.67	65.79	TUNTAS MUDA	10.12	1
KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	52.08	49.21	BELUM TUNTAS	-2.87	0
KAB. OGAN ILIR	53.85	52.63	BELUM TUNTAS	-1.22	0
KAB. EMPAT LAWANG	49.4	45.57	BELUM TUNTAS	-3.83	0
KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	52.62	50.70	BELUM TUNTAS	-1.92	0
KAB. MUSI RAWAS UTARA	50.29	51.92	BELUM TUNTAS	1.63	1
KOTA PALEMBANG	59.87	65.85	TUNTAS MUDA	5.98	1
KOTA PAGAR ALAM	56.15	57.21	BELUM TUNTAS	1.06	1
KOTA LUBUK LINGGAU	55.35	54.99	BELUM TUNTAS	-0.36	0
KOTA PRABUMULIH	58.44	65.80	TUNTAS MUDA	7.36	1
SUMATERA SELATAN	52.57	43.42	BELUM TUNTAS	-9.15	0
Jumlah prov/kab/kota yang mengalami kenaikan mutu pembelajarannya					6
Jumlah prov/kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan					18
Persentase Kenaikan					33.33%
Target Capaian IKK 1.2					30%
Realisasi Capaian IKK 1.2					111.11%

Sumber data: Data olah rapor pendidikan – PSKP



**Gambar 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Tahun 2022, 2023
dan Renstra 2024**

Pada tahun 2022, data yang dipergunakan dalam perhitungan terkait capaian indikator 1.2 adalah berdasarkan data hasil akreditasi sekolah. Sementara pada tahun 2023, data yang dipergunakan dalam perhitungan berdasarkan pada kenaikan mutu pembelajaran melalui perhitungan indeks SPM rapor pendidikan prov/kab/kota pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Sumatera Selatan, melalui advokasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKK 1.2. di mana setiap program dan kegiatan tersebut diidentifikasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya melalui indikator objektif sebagai berikut.

1. Melaksanakan Pembinaan Kurikulum Merdeka

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-02 (Implementasi Kurikulum Merdeka)		
1	Peningkatan pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana IKM menjadi 90%	90%	77,50%
2	Peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar peserta didik menjadi 50%	50%	86,17%
3	Peningkatan hasil AN tahun 2024 untuk sekolah IKM minimal 50% untuk seluruh satuan pendidikan IKM yang berdasarkan hasil AN 2023 ada pada level 1 dan 2 untuk capaian literasi, numerasi, karakter, dan indeks pembelajaran.	0%	0%
	PDM-09 (Transisi PAUD-SD)		
1	75% Kabupaten/Kota melaksanakan advokasi serta aksi konkret untuk penguatan transisi PAUD-SD	Belum Tersedia	100%
3	10% satuan pendidikan (SD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru	10%	46,31%

2. Melaksanakan Pembinaan Asesmen Nasional

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-06 (Asesmen Nasional)		
1	Meningkatkan persepsi positif <i>Stakeholder</i> Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulinggar sebesar 30%	30%	82,55%

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
2	Meningkatkan delta rata-rata 2% partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023	98,55%	97,49%

3. Melaksanakan Pembinaan Transfer Daerah

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-03 A (Sumber Daya Sekolah)		
1	100% satuan pendidikan penerima BOS menggunakan ARKAS 4.0	100%	99,00%
2	50% satuan pendidikan penerima BOP menggunakan ARKAS 4.0	50%	63,00%
3	60% satuan pendidikan menggunakan SIPLah	71,16%	63%
4	100% satuan pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu	100%	99,5%
5	50% satuan pendidikan melakukan perencanaan pada T-1	95,12%	105%

4. Melaksanakan Pembinaan Sekolah Penggerak

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-01 (Program Sekolah Penggerak)		
1	Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 80% PSP 1	94,20%	78,00%
2	Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 60% PSP 2	87%	85,49%
3	Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 40% PSP 3	78,50%	87,09%
4	Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, dengan target 80% PSP 1	81%	100%
5	Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, dengan target 50% PSP 2	53%	95%
6	35% pemda siap melanjutkan Implementasi PSP Angkatan 1 (regulasi dan anggaran)	2 Pemda	3 Pemda

5. Melaksanakan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-04 A (Rapor Pendidikan)		
1	100% Pemda mengakses Rapor Pendidikan	100%	100%
3	100% Satpen Jenjang Dasar dan Menengah Mengakses Rapor Pendidikan	100%	99,72%

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-04 B (PBD Satuan Pendidikan)		
1	80% Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan PBD melalui unduh lembar PBD.	84,43%	99,57%
3	30% Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki delta positif pada capaian indikator prioritas Rapor Pendidikan.	30%	77%
	PDM-04 C (PBD Daerah)		
1	50% Pemda memasukkan indikator kinerja SPM Pendidikan	56%	100%
2	50% Pemda memenuhi subkegiatan minimal prioritas SPM Pendidikan	56%	100%
3	30% Pemda (Provinsi dan Kab/Kota) memiliki delta positif indeks SPM Pendidikan.	30%	33,33%

6. Melaksanakan Pembinaan Kemitraan

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-05 (Kemitraan Daerah)		
1	Persepsi PEMDA terhadap Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar meningkat minimal positif 90% melalui advokasi UPT	90%	100%
2	Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah meningkat sebesar 80-100% melalui advokasi UPT kepada Pemda	100%	13%
3	Peningkatan capaian delta AN sebesar 30% melalui advokasi UPT kepada Pemda (peningkatan skor AN untuk 30% satpen di Indonesia)	34%	41%
	PDM-11 (Gerakan Sekolah Sehat)		
1	75% Pemerintah Daerah mengeluarkan SE tentang Kebijakan Implementasi Sekolah Sehat	75%	100%
2	16 Satuan Pendidikan meningkat kategori status kesehatannya dari merah menjadi kuning di tahun 2024	100%	100%
3	75% dari satuan pendidikan binaan (40 satuan pendidikan) mengimplementasikan program gerakan sekolah sehat dan menetapkan kebugaran peserta didiknya	75%	108%

7. Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Inklusi

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-12 (Transformasi Pendidikan Khusus)		
1	Peningkatan skor sebesar 0,2 untuk 30% satuan pendidikan umum dan kejuruan yang memiliki iklim inklusivitas merintis	30%	56,63%

8. Melaksanakan Pembinaan Digitalisasi Sekolah.

Program Prioritas		Target UPT Tahun 2023	Capaian UPT Tahun 2023
	PDM-03 B (Optimalisasi Chromebook dan belajar.id)		
1	100% penerima bantuan Chromebook memanfaatkan untuk pembelajaran	100%	97,57%
2	100% akun belajar.id aktif	100%	66,54%
3	50% satuan pendidikan memanfaatkan Google Workspace for Education	50%	83,60%

Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian target kinerja didukung beberapa faktor berikut.

1. Komitmen bersama pemangku kepentingan daerah untuk mendukung Kebijakan Merdeka Belajar, salah satunya diwujudkan dengan penandatanganan konsensus oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Terbitnya regulasi yang mendukung pelaksanaan program prioritas Kebijakan Merdeka Belajar.
3. Terjalannya komunikasi yang intens melalui berbagai kanal informasi dan media sosial dengan berbagai pemangku kepentingan.
4. Adanya *Asset Best Thinking* dari beberapa pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan pelaksanaan program prioritas Kemendikbudristek melalui program *cross cutting*.
5. Penyelarasan tim kerja yang lebih terarah melalui PDM yang ada dengan pemerintah daerah.
6. Kolaborasi yang dilakukan BPMP Provinsi Sumatera Selatan diakui oleh pemerintah daerah.
7. Penerapan aplikasi MARKAS yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah (Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)).
8. UPT dapat memantau progres capaian melalui dashboard platform digital yang tersedia.
9. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan daerah melalui pelibatan BPMP dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Kendala dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian target kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. Terdapat miskonsepsi terhadap ragam Kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi peran penting dalam transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
2. Keterbatasan pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terhadap ragam platform pendidikan berbasis teknologi yang mendukung transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.
3. Pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terhadap ukuran capaian sistem pendidikan yang mempengaruhi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan.
4. Kerjasama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan pendidikan di daerah dalam upaya transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan perlu lebih dioptimalkan
5. Keterbatasan pemahaman pelaku ekosistem pendidikan terkait konsekuensi yang diterimanya untuk mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya pemulihan pembelajaran dan transformasi pendidikan
6. Komitmen pemangku kepentingan pada ekosistem pendidikan dalam bersinergi, berkolaborasi, dan berbagi peran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan
7. Keterbatasan infrastruktur pendukung dalam transformasi digital yang mendukung implementasi ragam Kebijakan Merdeka Belajar.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran dalam melakukan fasilitasi, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program prioritas Kemendikbudristek
2. Memprioritaskan penugasan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan sasaran capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung program prioritas Kemendikbudristek
3. Meningkatkan intensitas kerja sama dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan pendidikan di daerah
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi BPMP dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen dalam penyelarasan pelaksanaan program prioritas
5. Mengembangkan strategi komunikasi kepada pemangku kepentingan untuk transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan

6. Melaksanakan advokasi yang lebih fokus dan asimetris kepada pemerintah daerah untuk transformasi pendidikan dan pemulihan pembelajaran serta peningkatan kualitas layanan pendidikan
7. Optimalisasi, kolaborasi, dan pendampingan melekat terkait implementasi Kebijakan Merdeka Belajar
8. Lebih mengintensifkan rapat berkala dalam upaya mencapai kinerja, mitigasi risiko, dan manajemen isu
9. Mengaktivasi pertemuan PMO yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan secara berkala dalam penyeselarasan pelaksanaan program
10. Penguatan peran dan *product knowledge* pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan memahami Kebijakan Merdeka Belajar
11. Peningkatan kompetensi melalui berbagai bentuk kegiatan seperti *In House Training* (IHT) maupun belajar melalui komunitas belajar (kombel) di internal BPMP maupun kombel antar-UPT Kemendikbudristek

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Memperkuat peran dan kapasitas SDM BPMP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan unit utama dan direktorat teknis Kemendikbudristek, serta UPT Kemendikbudristek di Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penyeselarasan program kegiatan.

Sasaran Kegiatan 2



Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Sasaran Kegiatan (SK 2) adalah meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, untuk ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Kegiatan dengan tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator kinerja kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.



IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

Target, Realisasi dan Capaian

Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dengan metoda perhitungan sebagai berikut:

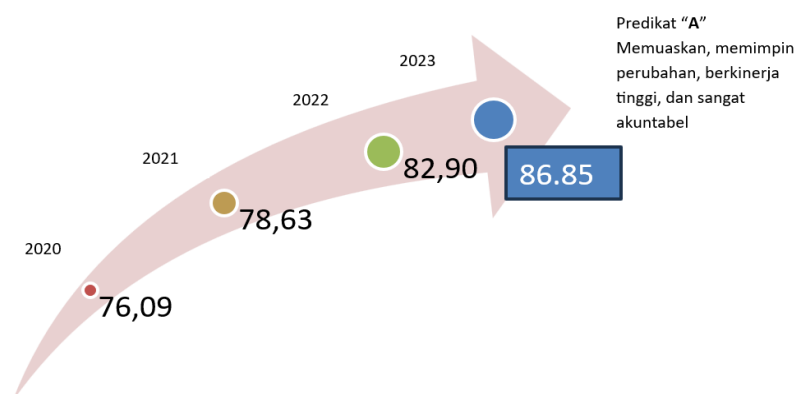
Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja]+[Pengukuran kinerja]+[Pelaporan Kinerja]+[Evaluasi Kinerja]

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan Setditjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia memperoleh nilai 86,85 **Predikat A**, dengan interpretasi **memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel**. Dengan predikat A ini diperoleh persentase capaian kinerja IKK 2.1 sebesar 100% sehingga realisasi kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi target renstra. Dengan demikian pada tahun 2023 terdapat peningkatan nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 sebesar 82,90 predikat A dengan capaian kinerja 100%, dan tahun 2023 meningkat menjadi 86,85 predikat A dengan capaian kinerja 100%.



Gambar 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.1 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, 2023 dan Target Akhir Renstra 2024

Tingkat implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 disajikan pada Gambar 3.6 berikut.



Gambar 3.6 Tingkat Implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Nilai implementasi SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dapat dilihat sebagai berikut.

No	Komponen/Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	26,1
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,5
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	86,85

Faktor pendukung terpenuhinya capaian kinerja IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan yaitu renstra, dan perjanjian kinerja;
2. Kegiatan penyusunan rencana kinerja tahunan dan rencana kerja aksi;
3. Kegiatan reviu renstra;
4. Kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran per triwulan;
5. Kegiatan pengukuran kinerja per triwulan, dan;
6. Kegiatan penyusunan laporan kinerja.

Selain itu strategi yang telah dilakukan untuk perbaikan berdasarkan beberapa faktor penyebab yang menjadi catatan di Tahun 2022 untuk meningkatkan pencapaian nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

1. Satker telah memastikan dokumen SKP yang diunggah telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai menggambarkan hubungan berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) melalui Matriks Peran Hasil.
2. Satker telah memberikan informasi mengenai tata cara pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 terjadi peningkatan pada nilai akuntabilitas kinerja 2023 tetapi ada beberapa catatan pada komponen perencanaan dan pengukuran yaitu:

- a. Belum disajikan data sandingan yang menunjukkan bahwa evaluasi tahun sebelumnya telah dijadikan dasar perencanaan kinerja tahun berikutnya. Sehingga penetapan target pada IKK 1 dan IKK 2 ditetapkan berdasarkan analisis capaian target tahun sebelumnya.
- b. Belum disajikan laporan pelaksanaan *crosscutting*, termasuk kaitannya dengan program kerja PMO yang ada pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
- c. belum dilampirkan dokumen analisis kebutuhan dalam melakukan penataan pegawai di internal organisasi dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja sebagai dasar melakukan mutasi pegawai.

Berdasarkan catatan terhadap komponen perencanaan dan pengukuran di atas maka dikeluarkan rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh BPMP Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Agar diuraikan dalam matriks hasil capaian tahun sebelumnya atas target yang sudah ditetapkan, sehingga menggambarkan keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai.
- b. Agar disajikan laporan pelaksanaan *crosscutting*, termasuk kaitannya dengan program kerja PMO yang ada pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Agar melampirkan dokumen analisis kebutuhan dalam melakukan penataan pegawai di internal organisasi (dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja sebagai dasar melakukan mutasi pegawai).

Sehubungan dengan beberapa rekomendasi di atas maka BPMP Provinsi Sumatera Selatan segera menindaklanjuti, ini ditandai dengan tindak lanjut rekomendasi huruf a yaitu penyusunan matriks hasil capaian tahun sebelumnya atas target yang sudah ditetapkan, sehingga menggambarkan keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai sudah disajikan dalam laporan kinerja tahun 2023 ini, dan untuk point b dan c akan ditindaklanjuti pada Triwulan I di Tahun 2024.



IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera

Target, Realisasi dan Capaian

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL LPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah kinerja anggaran dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah “93,49” diperoleh dari:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = [50\% \times \text{Nilai EKA}] + [50\% \times \text{Nilai IKPA}]$$



Gambar 3.7 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL
BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Target Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 dengan target renstra 83 dan realisasi 97,54 diperoleh persentase capaian 117,52%, dan pada tahun 2023 dengan target pada renstra sebesar 84 dan realisasi 93,49 diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 111,30% sehingga pada tahun 2022 dan 2023 telah melampaui target renstra.

Realisasi capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 93,49 melampaui target kinerja tahun berjalan sebesar 84 dan melampaui target kinerja akhir renstra 2024 sebesar 85. Berdasarkan hal tersebut, maka target akhir renstra 2024 dilakukan penyesuaian dari sebelumnya 85 menjadi 94,00 sebagai berikut.



Gambar 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja IKK 2.2 BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, 2023, dan Target Akhir Renstra 2024

BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, dimana semua kegiatan dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen, serta memperkuat tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang bermuara pada peningkatan capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2023 BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai UPT Kemendikbudristek terus meningkatkan pelayanan prima dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM serta sarana dan prasarana BPMP Provinsi Sumatera Selatan.



B. Capaian Anggaran

B.1 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp33.579.985.000,- dan blokir anggaran sebesar Rp 54.000.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan Rp32.623.579.052,- dengan persentase daya serap sebesar 97,15%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, melalui 4 (empat) Rincian Output (RO) dengan rincian penyerapan anggaran berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

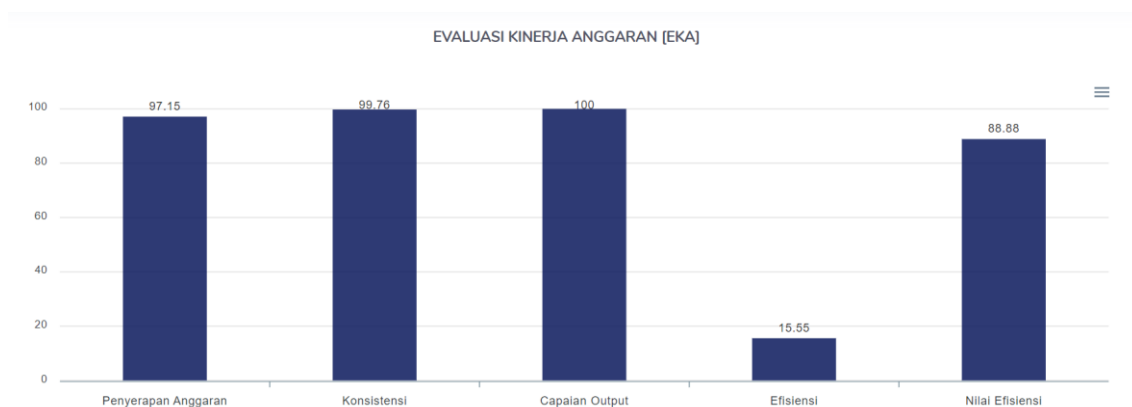
KODE	URAIAN	TOTAL				BLOKIR (Rp)
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)	
419528	BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN	33.579.985.0000	32.623.579.052	97,15	956.405.948	54.000.000
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	16.131.411.000	15.881.392.177	98,45	250.018.823	
2005.EBA.962	Layanan Umum	375.000.000	97.210.009	25,92	277.789.991	
2005.EBA.994	Layanan Perkantoran	17.023.574.000	16.742.186.875	95,95	706.387.125	
2005.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50.000.000	49.376.060	98,75	623.940	

B. 2 Efisiensi Anggaran

Penyerapan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 sebesar 97,15%, konsistensi terhadap rencana penarikan dana sebesar 99,76%, capaian output sebesar 100%, dan efisiensi anggaran sebesar 15,55 % senilai Rp522.168.766.750, sumber data aplikasi SPASIKITA, dengan demikian terdapat nilai efisiensi anggaran. Adapun rumus untuk menghitung nilai efisiensi anggaran adalah sebagai berikut.

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi}/20) \times 50$$

Berdasarkan rumus di atas, maka pada tahun 2023 diperoleh persentase nilai efisiensi anggaran sebesar 88,88%.



Ketercapaian target indikator kinerja dapat dilihat dari faktor keberhasilan BPMP Provinsi Sumatera Selatan di antaranya adalah:

1. Efisiensi anggaran dengan optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan paket *meeting*
2. Identifikasi pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan mekanisme pelaksanaan secara luring dan daring.

Anggaran hasil efisiensi digunakan atau dioptimalisasikan kembali untuk memperbanyak volume *output* dari kegiatan dan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 1.2 yaitu persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Penambahan volume *output* kegiatan, antara lain:
 - a. Diseminasi SPM Pendidikan ke Pemerintah Daerah dari semula sasaran 40 orang menjadi 80 orang
2. Inisiasi kegiatan baru yang mendukung, antara lain:
 - a. Apresiasi Merdeka Belajar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023
 - b. Koordinasi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
 - c. Advokasi secara terintegrasi terhadap Kebijakan Merdeka Belajar kepada pemerintah daerah dan satuan
 - d. Pertemuan PMO yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Bersama BPMP Provinsi Sumatera Selatan secara berkala dalam penyelarasan pelaksanaan program dan sarana komunikasi dan koordinasi implementasi program prioritas Kemendikbudristek RI.
3. Menjaring Program kerjasama atau crosscutting dengan pemerintah daerah

C.2 Penghargaan

Pada tahun 2023, BPMP Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan atas keberhasilan dalam melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:

1. Melaksanakan kolaborasi dan pendampingan implementasi Merdeka Belajar dengan Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.



2. Melaksanakan optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.



3. BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai penerima apresiasi/penghargaan dari Kemendikbudristek atas partisipasi aktif dalam pendampingan UPT lain dalam meraih ZI WBK.



4. BPMP Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan Peringkat I Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Terbaik Kategori Pagu Besar



C.3 Program *Crosscutting/Collaborative*

Program *crosscutting/collaborative* merupakan salah satu upaya dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui sinergi dan kolaborasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan terutamanya Bappeda dan Dinas Pendidikan. Inisiasi *crosscutting* muncul dari pihak eksternal yang memiliki kepedulian bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya terutama melalui implementasi Kebijakan Merdeka Belajar.

Pada tahun 2023 BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa program *crosscutting/collaborative* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

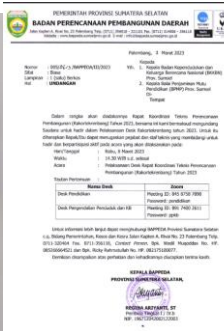
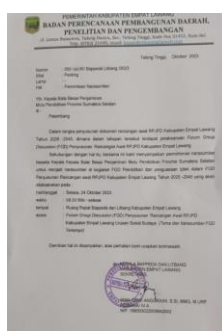
Tabel 3.7 Program *Crosscutting/Collaborative* BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat
1	Kab. Banyuasin	Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Bimtek PBD melalui Rapor Pendidikan Tahun 2023	22 Juli 2023	Hotel Emilia Palembang
		Pelatihan Penyusunan Perencanaan Berbasis Data melalui Rapor Pendidikan Jenjang SD	8 s.d. 10 September 2023	Hotel Emilia Palembang
2	Kab. Empat Lawang	Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		FGD Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025-2045	24 Oktober 2023	Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Kabupaten Empat Lawang

No.	Kab/Kota	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat
3	Kab. Lahat	KSS/GSS		
		Bimtek Kampanye Sekolah Sehat Jenjang SD	27 s.d. 28 Nov 2023	Hotel Callista Lahat
		Bimtek Kampanye Sekolah Sehat Jenjang SMP	8 November 2023	Aula Disdikbud KAB. Lahat
4	Kab. Muara Enim	Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Sekolah Adiwiyata dan Pemanfaatan Sarana Prasarana SMP Tahun 2023	3 s.d. D114 Maret 2023	Hotel Griya Sintesa Kabupaten Muara Enim
		PBD PAUD	11 s.d. 12 Agustus 2023	Hotel Griya Sintesa Kabupaten Muara Enim
5	Kab. Musi Banyuasin	Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Peningkatan kapasitas pengawas dan penilik sekolah	25 Oktober 2023	Gambo Hotel, Kab.Musi Banyuasin
6	Kab. Musi Rawas			
7	Kab. Musi Rawas Utara			
8	Kab. Ogan Ilir	Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Perencanaan Berbasis Data melalui Rapor Pendidikan Jenjang SD	11s.d.13 September 2023	Emilia Hotel Palembang;
		Perencanaan Berbasis Data melalui Rapor Pendidikan Jenjang SMP	13 s.d.15 September 2023	Emilia Hotel Palembang;
		BOSP/ARKAS		
		Peningkatan Kapasitas Pengeolaan Dana BOP PAUD	20 s.d. 22 Juli 2023	Emilia Hotel Palembang;
9	Kab. Ogan Komering Ilir			
10	Kab. Ogan Komering Ulu			
11	Kab. OKU Selatan	Implementasi AN		
		Bimbingan Teknis Operator AN jenjang SMP	7 s.d.8 Maret 2023	Gedung PGRI Muara Dua
		Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Pendampingan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data PAUD PNF	9 Maret 2023	Daring
12	Kab. OKU Timur	Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data dalam rangka penyusunan ARKAS dan Pengelolaan BOP PAUD	6 s.d.7 September 2023	BPSDM Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Martapura Kab. OKU Timur
		BOSP/ARKAS		

No.	Kab/Kota	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat
		Bimtek ARKAS 4 bagi PAUD dan Kesetaraan	29 November 2023	BPSDM Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Martapura Kab. OKU Timur
		PIP		
		Percepatan Aktivasi Akun PIP	18 Desember 2023	Daring
13	Kab. PALI	BOSP		
		Sosialisasi dan Pengelolaan BOSP PAUD	4 s.d. 5 Desember 2023	Aula RM Sejahtera Airport Pendopo
14	Kota Lubuklinggau	Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Sosialisasi PBD dan Sulingjar PAUD	5 September 2023	Hotel Cozy Lubuklinggau
15	Kota Pagar Alam	Implementasi AN		
		Sosialisasi ANBK SMP	25 Juli 2023	Daring
16	Kota Palembang	Implementasi AN		
		Bimbingan Teknis Proktor SD	25 s.d. 26 Agustus 2023	Hotel Amaris Palembang
		Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Pembinaan Penggunaan TIK untuk Pendidikan melalui PBD bagi Kepala Sekolah SMP	26 s.d. 27 September 2023	Beston Hotel Palembang;
		PKLK (Pendidikan Layanan Khusus)		
		Sosialisasi PKLK Bagi Satuan Pendidikan SD Se-Kota Palembang Tahun 2023	22 Juni 2023	Hotel Alts Palembang
17	Kota Prabumulih	Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Workshop Rapor Pendidikan dalam Perencanaan Berbasis Data	30 Oktober 2023	Hotel Grand Nikita Prabumulih.
18	Provinsi Sumatera Selatan	Implementasi Rapor Pendidikan dan PBD		
		Rapat Persiapan Pengisian Indikator Urusan Pendidikan pada Rakortekrenbang Provinsi Sumatera Selatan	03 Maret 2023	Ruang Rapat PKK Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
		Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Desk Pendidikan Tahun 2023	08 Maret 2023	daring melalui aplikasi zoom meeting
		Rapat Koordinasi Desk Rembuk Stunting Tingkat Provinsi dan Tagging APBD	10 April 2023	Ruang Rapat Dapunta Hyang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kab/Kota	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat
		Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023		
		Tim Panelis Bimtek Pelaksanaan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2023	31 Mei 2023	Ruang Rapat Dapunta Hyang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



Dampak dari program *crosscutting/collaborative* yang dilaksanakan BPMP Provinsi Sumatera Selatan yang bersinergi dengan ekosistem pendidikan di daerah adalah adanya penguatan pemahaman pemerintah daerah terhadap program prioritas Kemendikbudristek

terutama tentang Implementasi Kurikulum Merdeka, Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan, Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data Daerah, Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar, Pengelolaan BOSP, serta Pengelolaan ARKAS dan MARKAS.

Dilanjutkan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap keberlanjutan implementasi program prioritas Kemendikbudristek dalam bentuk:

1. Penyusunan dan penetapan 15 regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan implementasi program prioritas Kemendikbudristek;
2. Alokasi anggaran daerah dalam memastikan keberlanjutan implementasi program prioritas Kemendikbudristek;
3. Program dan kegiatan daerah untuk mendukung keberlanjutan implementasi program prioritas Kemendikbudristek.

BAB IV | PENUTUP

A. Kesimpulan

BPMP Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang di dalamnya telah disepakati berbagai sasaran kegiatan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan data yang ada, pada rentang 2020-2023 kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki tren yang meningkat, sementara serapan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki tren yang kurang lebih sama, *fluktuatif*.

Berdasarkan data yang diuraikan pada Bab III terkait persentase capaian kinerja fisik dan anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan persentase capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 117,72% dan penyerapan anggaran sebesar 97,15%, dengan rincian sebagai berikut:



1. Persentase capaian kinerja fisik pencapaian sasaran kegiatan “Meningkatnya mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 129,79% dengan rincian:
 - ✓ IKK 1.1 Persentase capaian kinerja sebesar 148,47%;
 - ✓ IKK 1.2 Persentase capaian kinerja sebesar 111,11%.
2. Persentase capaian kinerja fisik sasaran kegiatan “Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel” sebesar 105,65% dengan rincian:
 - ✓ IKK 2.1 persentase capaian kinerja sebesar 100%;
 - ✓ IKK 2.2 persentase capaian kinerja sebesar 111,30%.

3. Persentase capaian daya serap anggaran BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 97,15%. Dengan rincian PAGU Rp 33.579.985.000,- realisasi Rp 32.623.579.052,- Sisa Rp 956.405.948,-
4. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,55 % senilai Rp 522.168.766.750,-, sumber data aplikasi SPASIKITA, nilai efisiensi anggaran.

B. Permasalahan

Dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran di BPMP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA belum terpenuhi secara optimal.
2. Kualitas pendidikan antar satuan pendidikan dan antar wilayah masih memiliki disparitas yang cukup tinggi.
3. Pemerataan akses pendidikan yang belum merata terutama untuk daerah/wilayah dengan kondisi geografis berupa perairan atau pegunungan.
4. Strategi dan pendekatan asimetris dan konsultatif belum efektif dan optimal terhadap hasil data capaian rapor pendidikan masing-masing pemerintah daerah dan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar.
5. Rotasi/mutasi pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah menjadi kendala/hambatan dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang efektif terkait keterlaksanaan dan keberlanjutan program-program prioritas Kemendikbudristek.
6. Strategi advokasi dan pendampingan asimetris Kebijakan Merdeka Belajar kepada pemerintah daerah dan pelaku ekosistem pendidikan lainnya belum memberikan hasil optimal.
7. Dukungan keberlanjutan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar oleh pemerintah daerah setelah penerbitan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.
8. Penguatan koordinasi dan komunikasi antara pemangku kepentingan daerah dan Tim Subja Wilayah terkait Kebijakan Merdeka Belajar dan program prioritas Kemendikbudristek belum optimal.
9. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan belum tuntas dan membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
10. Masih banyak Guru Penggerak yang belum diangkat/ditugasi oleh Pemerintah Daerah sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah.

Langkah Kerja Ke Depan

Beberapa langkah kerja ke depan yang perlu dirumuskan antara lain adalah:

1. Advokasi BPMP kepada pemerintah daerah/dinas pendidikan untuk percepatan peningkatan mutu pendidikan/pengumpulan data mutu pendidikan.
2. Fasilitasi, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mengutamakan/penentuan skala prioritas dalam penugasan pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang berasal dari program internal.
4. Koordinasi dan kolaborasi BPMP dengan ekosistem pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Koordinasi dan konsultasi BPMP kepada unit utama Kemendikbudristek untuk dapat mengakses ragam *platform* digital untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Kemendikbudristek.
6. Koordinasi dan kolaborasi dengan unit utama dan direktorat teknis Kemendikbudristek, serta UPT Kemendikbudristek di Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
7. Optimalisasi, kolaborasi, dan pendampingan melekat terkait pemanfaatan ragam *platform* digital kepada dinas pendidikan atau satuan pendidikan yang memerlukan intervensi khusus.
8. Akselerasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan *platform* sumber daya sekolah (SDS), *platform* rapor pendidikan, dan *platform* merdeka mengajar.
9. Pertemuan rutin PMO Dinas Pendidikan pada setiap bulan untuk membahas isu-isu strategis berkaitan dengan kebijakan/program merdeka belajar dan penyampaian progres pelaksanaan program.
10. Penguatan peran pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
11. Pelaksanaan berbagai bentuk komunitas belajar (kombel) dalam BPMP Provinsi Sumatera Selatan dan pengembangan kombel antar UPT Kemendikbudristek.



Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aria Ahmad Mangunwibawa

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Indralaya, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan,



Iwan Syahril



Aria Ahmad Mangunwibawa

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 20.643.003.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 15.103.279.000
		TOTAL	Rp. 35.746.282.000

Indralaya, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan,



Iwan Syahril



Aria Ahmad Mangunwibawa

Pengukuran Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
SK 1. Meningkatkan mutu pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan	IKK 1.1. Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96	2.91	148.47%
	IKK 1.2. Persentase Prov/Kab/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	33.33	111.11%
SK 2. Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel	IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	A	A	100%
	IKK2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	84	93.49	111.30%



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

BPMP Provinsi Sumatera Selatan,
30 Januari 2024
Ketua Tim Reviu

Tri Handoyo, S.Kom, MM
NIP 19751228 200112 1 002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Jalan Raya Lintas Timur Km.36 Indralaya - Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368, Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>